



පිළිගැනීමේ පදනම
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
සිංගා රාජ්‍ය ප්‍රජා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
පිළිගැනීමේ පදනම
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
සංවර්ධන ප්‍රජා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව (197307071993021002)
JALAN PAHLAWAN NOMOR 1 SINGARAJA (81117), TELEPON (0362) 22488
Laman: www.dispmdppkb.bulelengkab.go.id, Pos-el: dispmdppkb.buleleng@gmail.com

Singaraja, 1 Juli 2026

Kepada:

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng

Cq. Bagian Organisasi Kabupaten Buleleng

di -

Singaraja

SURAT PENGANTAR

NOMOR: 000.8.6.2/685/Sekre/DPMDPPKB/VII/2026

No.	Jenis Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Laporan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2026	1 Gabung	Demikian untuk maklum atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Buleleng
Drs. Made Supartawan, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197307071993021002



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Sandi Negara

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TEMATIK PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2026

[illegible]

No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2025		Tahun 2026		Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Satuan	Bentuk Intervensi Sesuai SE MenPANRB	Keterangan Intervensi	Rencana Aksi	Output		Target										Instansi		Link Bukti Dukung
			Baseline	Satuan	Baseline	Satuan									Indikator	Satuan	Output Triwulan (Akumulasi)					Anggaran (Rp) Triwulan (Akumulasi)					Koordinator	Pelaksana	
																	Tahunan	I	II	Realisasi	20	Realisasi	21	Realisasi	22	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	

No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2025		Tahun 2026		Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Satuan	Bentuk Intervensi Sesuai SE MenPANRB	Keterangan Intervensi	Rencana Aksi	Output		Target										Instansi		Link Bukti Dukung
			Baseline	Satuan	Baseline	Satuan									Tahunan	Output Triwulan (Akumulasi)				TAHUNAN (Rp)	Anggaran (Rp) Triwulan (Akumulasi)				Koordinator	Pelaksana			
																I	Realisasi	II	Realisasi		I	Realisasi	II	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Realisasi	21	22	23	24	25	26	27	28	29
							Kurangnya insentif insentif yang diberikan pemerintah daerah untuk menarik investor guna meningkatkan nilai investasi	Terwujudnya Peraturan Bupati Kemudahan Investasi Daerah tentang Pemberian Insentif Investasi sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2024 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi	1	Jumlah kebijakan kemudahan investasi yang sesuai dengan ketentuan	1	Dokumen	Pemberian insentif yang mendorong peningkatan investasi di sektor-sektor prioritas	Fokus Intervensi pada Tema	1	Melaksanakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait pemberian insentif bagi para investor yang akan dianggarkan dalam Peraturan Bupati	1	Jumlah surat hasil koordinasi terkait musisi, rangsangan Peraturan Bupati Kemudahan Investasi	Dokumen	4	-	4	-	-	-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Substansi Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal	
							Kurangnya kesadaran pelaku usaha badan usaha (perorangan) untuk melaporkan kegiatan usahanya sehingga realisasi investasi tidak sejalan dengan rencana investasi.	Meningkatnya realisasi investasi melalui bimbingan teknis dan fasilitasi, guna meningkatkan tingkat pelayanan Perizinan Berusaha dan LKPM	1	Persentase pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis dan fasilitasi yang melaksanakan kewajiban pelaporan Perizinan Berusaha LKPM	100	%	Inovasi penyediaan layanan pendampingan bagi investor	Fokus Intervensi pada Tema	2	Menyusun Peraturan Bupati Kemudahan Investasi Daerah yang memuat berbagai macam fasilitas investasi, sebagai upaya peningkatan realisasi investasi	1	Jumlah dokumen Peraturan Bupati Kemudahan Investasi Daerah tentang Insentif Investasi	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Substansi Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal	
							Lemahnya pengawasan terhadap kegiatan usaha yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan telah memiliki perizinan berusaha	Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan perizinan	1	Persentase kegiatan usaha yang diawasi secara berkala	100	%	Peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan proses perizinan	Fokus Intervensi pada Tema	2	Menyusun Laporan Realisasi Investasi Daerah berdasarkan LKPM pada pelaku usaha pada sistem OSS-RPA	1	Jumlah Laporan Realisasi Investasi	Laporan	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Substansi Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal	
							Belum optimalnya penerapan kompetensi SDM Petugas Pelayanan dan Pengawasan Investasi	Memingkatnya kompetensi dari SDM Pengawasan Penanaman Modal yang berkompeten	1	Persentase SDM pengawasan perizinan dan pengawasan investasi	100	%	Penguatan SDM pengawasan perizinan dan pengawasan investasi	Fokus Intervensi pada Tema	3	Menyusun SK Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Kabupaten Buleleng Tahun 2026	1	Jumlah SK Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Kabupaten Buleleng Tahun 2026	Dokumen	1	1	-	-	-	-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Substansi Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal	
							Belum optimalnya proses perizinan pelayanan publik yang berdampak pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Terwujudnya proses perizinan pelayanan publik yang lebih sederhana dan mudah dengan menggunakan OSS-RPA dan Sistem Aplikasi Perizinan Online Buleleng (SAIAB)	1	Persentase proses perizinan pelayanan publik yang telah terintegrasi dengan SIREKO Buleleng	100	%	Penguatan pelayanan publik melalui pengembangan digitalisasi pelayanan publik secara menyeluruh	Fokus Intervensi pada Tema	2	Menyusun laporan pengawasan kegiatan usaha berdasarkan RAP Pengawasan Kegiatan Usaha	1	Jumlah laporan pengawasan kegiatan usaha	Laporan	4	1	2	-	-	-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Substansi Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal	
							Belum optimalnya pemanfaatan hasil lahan pertanian yang dibagikan dengan jumlah penduduk sehingga berpengaruh terhadap tingkat ketersediaan pangan	Memingkatnya pemanfaatan hasil lahan pertanian yang dibagikan dengan jumlah penduduk sehingga berpengaruh terhadap tingkat ketersediaan pangan	1	Jumlah Peta Ketersediaan Pangan	1	Dokumen	Penguatan ketahanan pangan bagi masyarakat miskin dan rentan	Fokus Intervensi pada Tema	1	Melaksanakan kasep pangan H2SA kepada Keluarga miskin ekstrem dan stunting untuk dapat menggunakan lahan secara maksimal sehingga dapat mencapai ketahanan pangan keluarga	1	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan terkait konsep pangan H2SA	Desa	98	15	44	90.054.500	14.882.505	45.027.250	Dinas Pertanian, Ketersediaan Pangan dan Perikanan	Dinas Pertanian, Ketersediaan Pangan dan Perikanan		
							Belum optimalnya pemanfaatan hasil lahan pertanian yang dibagikan dengan jumlah penduduk sehingga berpengaruh terhadap tingkat ketersediaan pangan	Memingkatnya pemanfaatan hasil lahan pertanian yang dibagikan dengan jumlah penduduk sehingga berpengaruh terhadap tingkat ketersediaan pangan	2	Persentase lahan pertanian yang dibagikan dengan jumlah penduduk sehingga berpengaruh terhadap tingkat ketersediaan pangan	1	Dokumen	Penguatan ketahanan pangan bagi masyarakat miskin dan rentan	Fokus Intervensi pada Tema	2	Melaksanakan Monev perizinan ROK dan Giat yang terkandung pada MHG	1	Jumlah SPFG yang dimonev terkait ketersediaan stok dan pemenuhan standar giat MHG	SPFG	12	3	6	3.984.200	569.985	1.964.455	Dinas Pertanian, Ketersediaan Pangan dan Perikanan	Dinas Pertanian, Ketersediaan Pangan dan Perikanan		
							Belum optimalnya pemanfaatan hasil lahan pertanian yang dibagikan dengan jumlah penduduk sehingga berpengaruh terhadap tingkat ketersediaan pangan	Memingkatnya pemanfaatan hasil lahan pertanian yang dibagikan dengan jumlah penduduk sehingga berpengaruh terhadap tingkat ketersediaan pangan	3	Persentase lahan pertanian yang dibagikan dengan jumlah penduduk sehingga berpengaruh terhadap tingkat ketersediaan pangan	1	Dokumen	Penguatan ketahanan pangan bagi masyarakat miskin dan rentan	Fokus Intervensi pada Tema	3	Menyediakan jaringan irigasi usaha yang dibangun, diperbaiki, dan dipertah	1	Jumlah jaringan irigasi usaha yang dibangun, diperbaiki, dan dipertah	unit	1	-	-	-	40.000.000	-	-	Dinas Pertanian, Ketersediaan Pangan dan Perikanan	Dinas Pertanian, Ketersediaan Pangan dan Perikanan	
TEMA Mendukung Ketahanan Pangan Nasional																													
1	1	1	83,36	Nilai	83,46	Nilai	Produknya pengetahuan dan kesadaran masyarakat menggunakan pangan bergizi, sehat dan aman	Memingkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat menggunakan pangan bergizi, sehat dan aman	1	Jumlah Masyarakat yang diberdayakan melalui Edukasi dan Promosi Penggerak Kemandirian Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Kemandirian Pangan)	33	Kelompok	Diseminasi pangan sesuai potensi lokal	Fokus Intervensi pada Tema	1	Menyediakan pelatihan pengetahuan dan inovasi produk pangan lokal	1	Jumlah pelatihan pengetahuan dan inovasi produk pangan lokal	Kelompok	22	4	10	232.566.367,00	34.884.958	116.283.186	Dinas Pertanian, Ketersediaan Pangan dan Perikanan	Dinas Pertanian, Ketersediaan Pangan dan Perikanan		
							Belum Optimalnya Lampung Pangan Masyarakat yang ada di masing - masing desa terhadap inflasi bahan pokok terutama beras untuk memenuhi jumlah cadangan pangan pemerintah yang dibutuhkan oleh pemerintah kabupaten Buleleng	Terwujudnya cadangan pangan pemerintah yang dibutuhkan oleh pemerintah kabupaten Buleleng	1	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Buleleng	66	Ton	Penguatan tata kelola distribusi dan logistik pangan	Fokus Intervensi pada Tema	1	Pendampingan pembinaan kelompok LPM (Lampung Pangan Masyarakat) guna peningkatan jasa bagi anggota kelompok LPM (Lampung Pangan Masyarakat)	1	Jumlah kelompok LPM yang mendapatkan pendampingan cadangan pangan	Kelompok	24	6	12	129.435.800	5.251.240	6.688.740	Dinas Pertanian, Ketersediaan Pangan dan Perikanan	Dinas Pertanian, Ketersediaan Pangan dan Perikanan		
							Belum optimalnya pemanfaatan hasil lahan pertanian yang dibagikan dengan jumlah penduduk sehingga berpengaruh terhadap tingkat ketersediaan pangan	Memingkatnya pemanfaatan hasil lahan pertanian yang dibagikan dengan jumlah penduduk sehingga berpengaruh terhadap tingkat ketersediaan pangan	2	Persentase lahan pertanian yang dibagikan dengan jumlah penduduk sehingga berpengaruh terhadap tingkat ketersediaan pangan	1	Dokumen	Penguatan ketahanan pangan bagi masyarakat miskin dan rentan	Fokus Intervensi pada Tema	2	Menyediakan pelatihan pengetahuan dan inovasi produk pangan lokal	1	Jumlah pelatihan pengetahuan dan inovasi produk pangan lokal	Kelompok	11	2	5	-	-	-	-	Dinas Pertanian, Ketersediaan Pangan dan Perikanan	Dinas Pertanian, Ketersediaan Pangan dan Perikanan	
							Belum optimalnya pemanfaatan hasil lahan pertanian yang dibagikan dengan jumlah penduduk sehingga berpengaruh terhadap tingkat ketersediaan pangan	Memingkatnya pemanfaatan hasil lahan pertanian yang dibagikan dengan jumlah penduduk sehingga berpengaruh terhadap tingkat ketersediaan pangan	3	Persentase lahan pertanian yang dibagikan dengan jumlah penduduk sehingga berpengaruh terhadap tingkat ketersediaan pangan	1	Dokumen	Penguatan ketahanan pangan bagi masyarakat miskin dan rentan	Fokus Intervensi pada Tema	3	Menyediakan jaringan irigasi usaha yang dibangun, diperbaiki, dan dipertah	1	Jumlah jaringan irigasi usaha yang dibangun, diperbaiki, dan dipertah	unit	1	-	-	-	40.000.000	-	-	Dinas Pertanian, Ketersediaan Pangan dan Perikanan	Dinas Pertanian, Ketersediaan Pangan dan Perikanan	

No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2025		Tahun 2026		Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Satuan	Bentuk Intervensi Sesuai SE MenPANRB	Keterangan Intervensi	Rencana Aksi	Output		Target										Instansi		Link Bukti Dukung		
			Baseline	Satuan	Baseline	Satuan									Indikator	Satuan	Output Triwulan (Akumulasi)				Anggaran (Rp) Triwulan (Akumulasi)				Koordinator	Pelaksana					
																	Tahunan	I	Realisasi	II	Realisasi	Tahunan (Rp)	I	Realisasi			II	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
		2	2	Laporan	Idin Indeksivitas SD 65,38; Idin Kesmanan SMP 62,34; Idin Kesmanan SD 78,21; Idin Kesmanan SMP 75,30; Idin Kelurahan SD 77,22; Idin Kelurahan SMP 74,30	%	Masih Rendahnya Kualitas Idin budaya sekolah aman, nyaman dan luhur	Terwujudnya lingkungan belajar yang aman dari kekerasan, nyaman dan mendorong ketahanan semua peserta didik (inklusi)	1	Persentase lingkungan belajar yang aman dari kekerasan, nyaman dan mendorong ketahanan peserta didik	100	%	Intervensi Khusus Timus Kelompok Rentan	Fokus Intervensi pada Tema	1	Melaksanakan pembinaan dan pendampingan program budaya sekolah aman dan nyaman	Jumlah sekolah yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan program budaya sekolah aman dan nyaman	Sekolah	775	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		
TEMA MENDORONG PENINGKATAN KUALITAS DAN ASKES LAYANAN KESEHATAN																															
1	Terwujudnya peningkatan bidang pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,4	Indeks	75,53	Indeks	Daya saing SDM masih rendah (IPM di bawah rata-rata Provinsi Hal)	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Usia Harapan Hidup (RHH)	75,29	Tahun	Penerapan teknologi digital dalam proses bisnis layanan kesehatan, mulai dari pendaftaran, rekam medis, dan pengelolaan antrian dan layanan konsultasi daring	Fokus Intervensi pada Tema	1	Penerapan sistem informasi kesehatan berbasis elektronik yang menyajikan data pendaftaran, rekam medis, dan pengelolaan antrian.	Jumlah fasilitas kesehatan yang menerapkan rekam medis elektronik yang menyajikan data pendaftaran, rekam medis, dan pengelolaan antrian	Puskesmas	20	20	-	-	-	-	266.400.000,00	66.600.000,00	-	133.200.000,00	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	https://data.bps.go.id/indikator/terakhir?table=ipm&series=ipm&period=2023-12-31&unit=provinsi&value=75.53
													Penguatan interoperabilitas data kesehatan antar unit layanan dan antar tingkatan pemerintahan	Fokus Intervensi pada Tema	2	Penerapan integrasi data kesehatan RME dengan sistem satu sehat Kemakes	Jumlah laporan integrasi data kesehatan RME dengan sistem satu sehat Kemakes	Laporan	1	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	https://data.bps.go.id/indikator/terakhir?table=ipm&series=ipm&period=2023-12-31&unit=provinsi&value=75.53		
													Penyediaan layanan kesehatan berbasis masyarakat dengan dukungan platform digital	Fokus Intervensi pada Tema	3	Pembuatan konten media digital yang digunakan untuk promosi kesehatan berbasis kasus di masyarakat	Jumlah konten media digital yang digunakan untuk promosi kesehatan berbasis kasus di masyarakat	Konten	12	3	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	https://data.bps.go.id/indikator/terakhir?table=ipm&series=ipm&period=2023-12-31&unit=provinsi&value=75.53		
													Penguatan pengambilan keputusan berbasis data untuk peningkatan layanan mutu layanan	Fokus Intervensi pada Tema	4	Penyediaan Dashboard kesehatan digital untuk pengambilan keputusan berbasis data	Jumlah dashboard kesehatan digital untuk pengambilan keputusan berbasis data	dashboard	1	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	https://data.bps.go.id/indikator/terakhir?table=ipm&series=ipm&period=2023-12-31&unit=provinsi&value=75.53		
													Peningkatan pemerataan akses dan kualitas layanan fasilitas kesehatan bagi masyarakat miskin/masyarakat di daerah tertinggal	Fokus Intervensi pada prioritas pembangunan nasional	5	Penyediaan sarana prasarana dan alat kesehatan pada pelayanan kesehatan	Jumlah puskesmas yang menyediakan sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	Puskesmas	20	-	-	-	-	-	13.867.935.898,05	3.466.983.974,51	-	6.933.967.949,02	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	https://data.bps.go.id/indikator/terakhir?table=ipm&series=ipm&period=2023-12-31&unit=provinsi&value=75.53
													Kebijakan pelaksanaan pemberian pangan sehat untuk mencegah stunting	Fokus Intervensi pada prioritas pembangunan nasional	6	Pemberian bahan makanan pada keluarga berisiko stunting (KRS balita 1-3 tahun)	Jumlah keluarga Berisiko Stunting (KRS balita 1-3 tahun) yang mendapatkan bantuan tambahan bahan makanan berupa susu tinggi kalori	Orang	179	-	-	-	-	-	39.380.000	39.380.000	31.325.000	-	Dinas Kesehatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penyakit dan Keluarga Berencana	https://data.bps.go.id/indikator/terakhir?table=ipm&series=ipm&period=2023-12-31&unit=provinsi&value=75.53
													Kebijakan pelaksanaan pemberian pangan sehat untuk mencegah stunting	Fokus Intervensi pada prioritas pembangunan nasional	7	Pemberian makanan tambahan pada balita T (berat badan tidak naik dibandingkan sebelumnya) yang mendapatkan makanan tambahan	Jumlah balita T (berat badan tidak naik dibandingkan sebelumnya) yang mendapatkan makanan tambahan	balita	1731	-	577	-	-	-	300.000.000	-	100.000.000	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	https://data.bps.go.id/indikator/terakhir?table=ipm&series=ipm&period=2023-12-31&unit=provinsi&value=75.53	

BUPATI BULELENG

I NYOMAN SUTJIDRA